

MENGGALI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SUNDA SEBAGAI PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH

Oleh

IYEP CANDRA HERMAWAN

Abstrak

Nilai-nilai demokrasi (*democracy values*) adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua bangsa di dunia. Diantaranya nilai kebebasan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu negara dipandang demokratis apabila menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Dikaitkan dengan kearifan lokal ternyata nilai-nilai demokrasi itu telah menjadi prinsip hidup dalam kearifan budaya Sunda. Sikap dan perilaku dalam budaya Sunda yang tentu *kukuh pengkuh* (berpegang teguh) pada landasan adat istiadat Sunda. Seperti ditegaskan dalam ungkapan “*kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea*”. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dinyatakan oleh *International Commission of Jurists* tentang ciri pemerintahan demokratis berdasarkan *rule of law*, maupun yang telah banyak digagas oleh pakar hukum kenegaraan. Menggali nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal Sunda dapat menjadi pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Kata Kunci: nilai demokrasi, kearifan lokal, pendidikan kewarganegaraan.

Pendahuluan

Nilai-nilai demokrasi tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai demokrasi diantaranya yang berwujud kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, musyawarah. Salah satu diantaranya sikap disiplin di kalangan masyarakat Indonesia tampak mengalami kecenderungan menurun, budaya menghormati terkikis oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang merambah manusia. Hubungan interaktif antar manusia secara langsung atau tatap muka sudah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Kearifan lokal sebagai pencerminan nilai-nilai yang berakar pada kehidupan masyarakat lokal atau daerah. Negara Indonesia merupakan negara yang ber-“*bhineka tunggal ika*”, yaitu memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, dan

lainnya; tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Berbeda, tapi satu tujuan. Didasarkan pada perbedaan tersebut, tetapi dirasakan penting untuk menggali nilai-nilai demokrasi yang berasal dari kearifan lokal yaitu kearifan budaya lokal Sunda. Seberapa jauh nilai-nilai demokrasi yang dapat terungkap dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat di tataran budaya Sunda. Bagaimana kaitannya antara nilai-nilai demokrasi yang ditegaskan dalam prinsip negara demokrasi berdasarkan *rule of law* dengan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada kearifan budaya lokal. Nilai-nilai tersebut juga dipandang penting apabila dikaitkan dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, yaitu sebagai pengembangan bahan ajar PPKn.

Batasan dan Kriteria Demokrasi

Pemahaman masyarakat tentang istilah demokrasi bukan lagi merupakan hal yang asing dan bahkan telah akrab dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Batasan tentang demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Sebutan tersebut bermula dari Orang Yunani-lah yang melahirkan kata ‘demokrasi’. Istilah demokrasi berasal dari kata ‘*demos*’ yaitu rakyat, masyarakat; dan ‘*kratos, kratein*’ yaitu pemerintahan, mengatur. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan di tangan rakyat atau mengatur tentang masyarakat.

Sejarah perkembangan ‘demokrasi’ dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara-kota Yunani dan Athena sekitar abad ke-4 SM. Dalam tahun 431 SM, seorang negarawan ternama Athena yaitu **Pericles** mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) *pluralisme*, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Eep Saefulloh, 1994). Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi dipraktekkan bersifat langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Dalam perkembangannya bahwa istilah dan prinsip demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah pemodernan sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan

kultural yang berintikan pendekatan pada pemerdekaan akal dari berbagai pembatasan, yakni *Renaissance* dan *Reformasi* telah menandai perubahan besar tersebut (Mahfud, 2000). Studi penelusuran istilah demokrasi, bahwa hal tersebut tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat, maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan (Eep Saefulloh, 1994).

Perkembangan demokrasi dan mengalami pertumbuhan ke arah pemodernan pada masa *Renaissance*. Dalam masa ini pemikiran besar, maju dan sangat mengejutkan muncul. Beberapa pemikiran tentang kekuasaan dari **Niccolo Machiavelli**, pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari **Thomas Hobbes**, **John Locke**, **Montesquieu**, dan **Jean Jacques Rousseau** telah mengilhami keberadaan demokrasi dan hingga kini dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Di dunia saat ini, pemerintahan yang dipandang paling baik dan sesuai adalah *demokrasi*, karena dalam kenyataan hampir semua negara di dunia menunjukkan dan mempraktekkan bentuk pemerintahannya adalah demokrasi.

Beberapa pendapat para ahli tentang kriteria demokrasi. Dalam kerangka pendefinisian yang bersifat umum dan menyeluruh, **Amien Rais** memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi, yaitu sebagai berikut: (a) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (b) persamaan di depan hukum; (c) distribusi pendapatan secara adil; (d) kesempatan pendidikan yang sama; (e) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persurat-kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; (f) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (g) mengindahkan fatsoen (tata krama politik); (h) kebebasan individu; (i) semangat kerja sama; dan (j) hak untuk protes.

Eep Saefulloh Fatah (2000) mengemukakan, dalam literatur ilmu politik modern (Barat) bahwa ciri pokok sebuah sistem yang demokratis disyaratkan adanya: (a) partisipasi politik yang luas; (b) kompetisi politik yang sehat; (c) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, terutama melalui proses pemilihan umum; (d) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; (e) diakuinya kehendak mayoritas; dan (f) adanya tata krama politik (*fatsoen*) yang disepakati dalam masyarakat.

Sedangkan *International Commission of Jurists* menyebutkan ciri pemerintahan yang demokratis berdasarkan *Rule of Law* mencakup hal berikut: (1) adanya perlindungan

konstitusional; (2) adanya pemilu yang bebas dan rahasia; (3) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak; (4) adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis; (5) adanya kebebasan beroposisi atau berserikat; dan (6) adanya pendidikan civics (Miriam Budiardjo, 2008).

Pendapat serupa dikemukakan **Robert Dahl** bahwa tujuh kriteria demokrasi mencakup hal sebagai berikut: (1) pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan secara konstitusional oleh wakil-wakil yang dipilih; (2) wakil-wakil rakyat itu dipilih dalam pemilihan yang dilakukan secara jujur dan berkala; (3) praktis semua orang dewasa berhak pilih; (4) praktis semua orang dewasa berhak dipilih; (5) warga negara berhak menyatakan pendapat mengenai masalah-masalah politik; (6) warga negara berhak memperoleh sumber-sumber informasi alternatif, yang memang ada dan dilindungi oleh hukum; dan (7) warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan (Mahasin, 2000).

Dalam budaya demokratis ditunjukkan adanya beberapa kata kunci, yaitu partisipasi warga, persamaan, kesempatan, kebebasan dan hak yang dimiliki warga; dengan mengindahkan pada tata krama politik yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa partisipasi warga dalam kehidupan berpolitik merupakan salah satu bagian dari pencerminan budaya demokratis. Partisipasi warga dalam pengawasan, pemilihan, menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan membentuk perkumpulan.

Nilai-nilai Demokrasi

Apabila menengok wajah demokrasi, maka ia merupakan suatu proses pewarisan dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keyakinan yang juga telah ditanamkan pada agama besar di dunia. **Richard Ketchum** (2004) mengungkapkan sebagai berikut:

- (1) Musa, seorang pemimpin bangsa Yahudi membacakan firman Tuhan kepada umatnya: *“Janganlah engkau menjadi saksi palsu terhadap sesamamu”*.
- (2) Di Cina, Confusius mengatakan: *“Jangan pernah melukai orang lain, jika engkau tidak mau dilukai”*.
- (3) Di India, Buddha Gautama mewasiatkan kepada para pengikutnya: *“Berjalanlah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mencari kesejahteraan bersama,*

menghilangkan penderitaan di muka bumi, demi kebaikan dan kebahagiaan di sisi Tuhan dan manusia”.

- (4) Di tanah Arab, Nabi Muhammad bersabda: “*Janganlah bertindak tidak adil terhadap sesama, niscaya engkau tidak akan diperlakukan secara tidak adil*”.
- (5) Di Palestina Kuno, ketika masih merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi, seorang Nazareth bernama Yesus Kristus bersabda: “*Cintailah tetanggamu*”.

Berdasarkan beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas menggambarkan betapa nilai-nilai keyakinan agama telah mengajarkan prinsip demokrasi. Manusia dilahirkan ke dunia agar tidak boleh bersikap sombong, curang, kasar, dan lain-lain. Sebaliknya ia diwajibkan untuk berbuat adil, bersikap hormat, mencintai sesamanya, dan tidak melukai hak orang lain. Meskipun batasan pembahasan ‘demokrasi’ dalam konteks keagamaan masih perlu ditelusuri lebih mendalam, namun kandungan makna dan prinsip demokrasi terdapat di dalamnya. Agama (Islam) mengajarkan bahwa tidak ada pemaksaan kehendak kepada orang untuk menganut suatu agama, hal ini mengindikasikan adanya mengagungkan ‘kedemokratisan’.

Elemen dasar keterlibatan publik atau warga menjadi sangat penting dalam menyuburkan demokrasi. Adanya kultur atau budaya demokratis yang bersemayam dalam masyarakat menjadi ukuran seberapa jauh keterlibatan publik tersebut dihargai keberadaannya. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kultur demokrasi. **Roland Inglehart** meyakini bahwa kultur demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya (*interpersonal trust*) antar warga negara yang diyakini menjadi pendorong yang cukup kuat ke arah demokrasi (Syadzily, 2003). Oleh karena itu, elemen penting dalam budaya demokratis, yaitu keterbukaan, kebebasan, persamaan dan keadilan, serta tanggung jawab sosial seharusnya memainkan peran penting dalam kehidupan berpolitik bangsa, tidak terpasung dan beku.

Didasarkan pada batasan, persyaratan dan kriteria perihal demokrasi; maka kehidupan berdemokratis akan terbangun dan terwujud apabila warga atau rakyat dapat memahami berbagai prinsip demokrasi tersebut di atas dan dapat melaksanakan secara konsisten sesuai dengan tata krama politik yang telah disepakati. Bahwa rusaknya bangunan demokrasi, apabila komitmen aturan dilanggar dan hak-hak warga tidak disalurkan.

Peristilahan demokrasi bermula pemakaiannya dalam dunia politik, dewasa ini dalam perkembangannya penggunaan kata demokrasi menjadi makin meluas; berbagai prinsip

demokrasi harus dijalani dalam bidang ekonomi, pendidikan serta bidang-bidang lainnya yang memang menuntut persyaratan itu.

Sebutan pemerintahan yang demokratis juga masyarakat yang demokratis apabila dibangun atas dasar berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemerintahan demokratis dimana kehidupan masyarakatnya berbeda-beda, maka keberbedaan yang tampak baik secara individual maupun kelompok harus mendapat pengakuan dan penghargaan. Disadari bahwa kehidupan dalam masyarakat dihadapkan pada berbagai perbedaan, baik secara individual ataupun kelompok, baik karena perbedaan status sosial ekonomi maupun latar belakang pendidikan, agama dan budaya. Karenanya, membangun masyarakat demokratis sering dihadapkan pada permasalahan karena keberbedaan latar belakang itu. Terbentuknya masyarakat demokratis harus saling menyadari, menghargai dan saling menghormati sesuai dengan aturan yang disepakati. Aturan yang disepakati dikukuhkan dalam wujud ‘konstitusi’.

Ciri masyarakat demokratis berpegang pada nilai-nilai atau prinsip demokrasi. Nilai-nilai yang dikembangkan sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu “*keterbukaan, toleransi, menghormati perbedaan, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan pemikiran kritis*” (Fachruddin, 2006; Zamroni, 2003).

Beberapa teladan yang menjadikan demokrasi dianggap penting, yang telah menjadikannya sebagai cita-cita yang diidam-idamkan. **Richard Ketchum** (2004) menggambarkan sebagai berikut: “Dalam sebuah negara yang benar-benar demokratis.....

- ikatan kekeluargaan kuno (tradisional) tidak dilanggar;
- jika ia mau memilih, ia bisa berteman dengan tetangganya tanpa rasa cemas ataupun curiga;
- ia bisa mengungkapkan rasa persahabatan atau rasa haru terhadap masyarakat dari negeri lain;
- ia bisa mencari kebijaksanaan masa lalu dan pengetahuan hari ini tanpa harus dikekang;
- ia boleh tidak sepakat dengan tetangganya dan juga mengkritisi pemerintahnya;
- ia benar-benar mempertahankan hak kebebasannya dalam memilih atau memberikan suara;
- ia mendukung program-program dalam rangka mengangkat martabat dan standar kehidupan umat manusia;
- ia menentang agresi, tetapi bersiteguh mempertahankan diri terhadap serangan dari luar maupun dari dalam;
- ia bisa meluangkan waktu untuk bermain atau bersantai;

- ia yakin perdamaian bisa dicapai melalui kerjasama antar sesama dan antar negara di mana pun;
- ia percaya kepada hak manusia untuk berubah”.

Berdasarkan beberapa contoh teladan tersebut di atas, membangun masyarakat demokratis harus dilandasi *pemikiran yang jernih, lurus, keterbukaan, tanpa rasa curiga, saling menghargai* dan *saling menghormati*. Seorang individu hidup dalam masyarakat harus menyadari tentang hakekat ‘keberadaan dan keberbedaan’, tidak senantiasa harus sama dan sejalan. Bila hal tersebut dijunjung tinggi dan saling menyadari, maka akan menumbuhkan nilai hakiki kemanusiaan dan kebijaksanaan. Nilai kesepakatan yang dijunjung tinggi tertuang dalam aturan, norma, kebiasaan, konvensi atau konstitusi. Nilai-nilai tersebut lahir karena musyawarah mufakat.

Kearifan Lokal, Identitas Budaya Daerah

Istilah “kearifan lokal” dikenal dengan sebutan “*local wisdom*” dan “*local genius*”. Istilah “*local wisdom*” (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sudaryat, 2015: 122). Istilah kearifan lokal sebagai terjemahan dari “*local genius*” dan diperkenalkan pertama kali oleh **Quaritch Wales** pada tahun 1948-1949 dengan arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan” (Rosidi, 2011: 29). Sedangkan pemakaian istilah “kearifan lokal” baru menjadi wacana di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 1980-an, ketika nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sebagai warisan nenek moyang sudah hampir digerus oleh modernisasi (Rosidi, 2011: 35) bahkan saat sekarang oleh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Pada masyarakat setempat atau bangsa tertentu memiliki kebudayaan tersendiri, namun dalam perkembangannya sering terjadi interaksi dan komunikasi sehingga menyebabkan dua jenis atau lebih kebudayaan bisa saling berpengaruh dan akhirnya tidak bisa dihindari terjadi perpaduan di antara keduanya. Misalnya kebudayaan Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Timur Tengah (Arab) atau oleh bangsa Cina dan bangsa India. Jelas pengaruhnya begitu kentara pada masyarakat di Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai aneka ragam etnik (suku bangsa) dengan kepemilikan budaya yang juga beragam. Namun secara khusus masing-masing daerah tersebut memiliki budayanya sendiri-sendiri. Dalam istilah yang populer yaitu “kearifan lokal” dan “*cultural identity*” (Rosidi, 2011: 33). Dikenal pula dengan sebutan atau istilah “budaya daerah” (Lutan, 2011: 70; Rosidi, 2004: 9). Konsep kebudayaan daerah menunjukkan identitas suatu kebudayaan yang lahir, berkembang dan mapan di suatu wilayah yang jelas batas-batasnya dalam konteks geografi dan didukung oleh suatu komunitas tertentu. Kebudayaan daerah juga mengandung konotasi kebudayaan suku bangsa (etnis) (Lutan, 2001: 70, 72).

Kearifan lokal dipandang penting untuk digali karena sebagai bahan dasar yang tersimpan dalam budaya masyarakat/adat/daerah. Potensi ini perlu digali dan dapat dikembangkan untuk menumbuhkan jati diri, keyakinan pada nilai-nilai budaya, sikap toleransi, kemandirian dan tanggung jawab. Potensi kearifan lokal ini bisa berbentuk lisan, tulisan, simbol, upacara adat ritual, pertunjukan, gambar, dan lain-lain yang disampaikan dan dilakukan secara turun temurun. Nilai-nilai kearifan lokal diawatirkan hilang atau mengalami kepunahan apabila tidak digali dan diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi pelanjutnya. Sebagai salah satu contoh kemampuan anak Sekolah Dasar bahkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam menggunakan bahasa Sunda di tataran Pasundan dirasakan amat rendah, apalagi mengenal berbagai konsep yang bertalian dengan “*pepernian (parabot dapur), alat-alat kasenian Sunda, sisindiran, kaulinan, paribasa Sunda, dll.....*” Anak-anak hampir tidak mengenali konsep tersebut apalagi untuk memainkan atau mempraktekannya.

Nilai-nilai Demokrasi dalam Kearifan Lokal (Sunda)

Dalam hal ini, kearifan lokal atau kebijaksanaan masyarakat setempat adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola fasilitas yang diberikan Tuhan pada manusia. Fasilitas tersebut adalah alam fisik, alam hayati, komunitas masyarakat dan norma-normanya, budaya dan agamanya (Rusyana, 2011; Sudaryat, 2015: 134).

Nilai kearifan lokal yang menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia serta hubungan manusia dalam masyarakat serta dengan negara. Ada ungkapan yang menyatakan “*hirup sauyunan*” dalam budaya Sunda menunjukkan sikap kebersamaan, bergotong royong. Pepatah Sunda menegaskan bahwa dalam hidup bersama, bertetangga harus “*Sareundeuk saigel,*

sabobot sapihanean. Ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak". Artinya menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu bekerja sama secara kompak dan harmonis dalam kebersamaan. Prinsip hidup yang didasarkan pada sikap tanggung jawab dan kebersamaan. Sikap kebersamaan yang harus dijalin dalam kehidupan baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga maupun bermasyarakat.

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat budaya Sunda dilandasi dengan ideologi atau sikap "*silih asah, silih asih, jeung silih asuh*". Artinya yang menggambarkan bahwa keterjalinan hubungan antara manusia dalam masyarakat harus hidup saling mengasah (mengajari), saling mengasihi (menolong) dan saling mengasuh (membimbing). Berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, Suryani (2011: 117-118) mengungkapkan beberapa nilai kearifan lokal Sunda sebagai berikut:

- 1) *Kawas gula jeung peueut* (seperti gula dengan nira yang matang);
- 2) *Ulah rubuh-rubuh gedang* (jangan rebah seperti pepaya);
- 3) *Ngadeudeul ku congo rambut* (memberi bantuan dengan ujung rambut);
- 4) *Ulah marebutkeun balung tanpa eusi* (jangan memperebutkan tulang tanpa isi);
- 5) *Ulah ngaliarkeun taleus ateul* (jangan menularkan talas gatal);
- 6) *Ulah nyolok mata bunceulik* (jangan mencolok mata yang melotot);
- 7) *Buruk-buruk papan jati* (betapa pun lapuknya kayu jati itu kuat).

Hubungan antar manusia dalam komunitas sosial harus tercermin "*kawas gula jeung peueut*". Artinya harus hidup rukun saling menyayangi, tidak pernah berselisih, pandai menghargai dan menghormati orang lain. Karenanya, perilaku dalam pergaulan bermasyarakat harus menyadari dan memahami maksud dan tujuannya, hidup tidak terbawa arus tetapi harus berpegang pada prinsip nilai-nilai yang baik, jujur. *Tong marebutkeun paisan kosong*. Artinya jangan berselisih atau beradu-argumentasi tanpa jelas dan arah yang dibicarakannya. Berbicara dan bermusyawarah itu harus bermakna, mengandung maksud dan tujuan yang jelas. Dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat juga harus mampu menjaga kepribadian, identitas diri, tidak saling menjelekkkan apalagi menyebarkan keburukan (menularkan aib) orang. Yang dalam pepatah Sunda disebutkan sebagai "*ulah ngaliarkeun taleus ateul*".

Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan negara bangsa bahwa manusia sebagai warga negara merupakan unsur utama dalam kehidupan negara dan harus tunduk patuh pada ketentuan yang berlaku. Sebagai warga negara, berarti manusia harus menjunjung tinggi hukum

dan peraturan. Berkenaan dengan ini, menurut Suryani (2011: 119) menyatakan bahwa hubungan antara manusia dengan negara dan bangsa yaitu:

- 1) *Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* (harus mengarah kepada hukum, mengarah ke kaki negara, bermupakat kepada orang banyak);
- 2) *Bengkung ngariung bongkok ngaronyok* (melingkar/lengkung dalam berkumpul bungkuk dalam berhimpun). Artinya bahwa kompak dalam hal menghadapi kesulitan atau masalah harus diselesaikan bersama;
- 3) *Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraje* (memohon pertimbangan). Artinya bahwa semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan.

Sesuai dengan ajaran yang diwariskan oleh orang tua (nenek moyang) bahwa perilaku masyarakat Sunda harus patuh pada negara dan menjunjung tinggi hukum demi kelangsungan dan kesejahteraan umum (orang banyak). Dalam mengerjakan sesuatu harus lebih mengedepankan kepentingan banyak orang, bangsa, dan negara. Ternyata jika dihubungkan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam kehidupan bernegara, di kalangan masyarakat dan budaya Sunda, hal tersebut telah menjadi tuntutan dan keharusan untuk ditaati dan diterapkan.

Beberapa prinsip atau nilai-nilai demokrasi didasarkan pada kearifan budaya Sunda, sebagaimana tercermin dalam ungkapan atau peribahasa berikut diantaranya:

- 1) *Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek* (tidak boleh korupsi, maling, mencuri, menyuap; kalau mau mengambil sesuatu harus seijin yang punya);
- 2) *Sacangreud pageuh sagolek pangkek* (menepati janji dan konsisten);
- 3) *Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, ulah lali tina purwadaksina* (harus mengikuti etika yang ada);
- 4) *Nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang* (berbicara harus tepat, jelas, bermakna, tidak asal bunyi);
- 5) *Kudu hade gogog hade tagog* (harus konsisten antara bicara dengan perilakunya);
- 6) *Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan* (saling bekerja sama membangun kemitraan yang kuat).

Mengkaji nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal Sunda ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini. Prinsip kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat merupakan salah satu bagian dari ciri pemerintahan demokratis yang dikukuhkan berdasarkan *International Commission of Jurists*.

Tentu saja bahwa kebebasan berbicara bukan sekedar berbunyi atau mengungkapkan kata-kata yang tampak tidak jelas arah dan maksudnya. Artinya “*nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang*”. Dalam kebebasan berbicara itu harus konsisten dan sudah sepantasnya antara pembicaraan dengan perilakunya menggambarkan kekonsistenan. Jika berjanji harus ditepati, jangan berbohong. Sedangkan dalam berbicara pun harus memperhatikan etika dan norma, sebab jika tidak dapat menimbulkan ketersinggungan. Dalam ungkapan Sunda yaitu “*biwir teu diwengku, letah teu tulangan*”. Artinya kehati-hatian dalam berbicara, berbuat, dan memutuskan sesuatu. Karena apabila tidak hati-hati maka bisa menyebabkan celaka (Ruhaliah, 2015: 48). Oleh karena itu bahwa pembicaraan dan perilaku harus mencerminkan keteladanan dan kesantunan.

Selain itu, prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi, berposisi adalah bagian dari ciri negara hukum yang demokratis. Artinya dalam pemerintahan demokratis menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kegotong-royongan seperti mendirikan organisasi baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Contoh dalam pemerintahan yaitu mendirikan partai politik untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu); menjalin kerja sama atau kemitraan antara berbagai negara dalam kepentingan tertentu. Dalam ungkapan Sunda digambarkan dengan pernyataan “*kudu paheuyek-heuyek leungeun paantay-antay panangan*”. Artinya bahwa dalam hidup bersama (organisasi) harus saling bekerja sama atau dapat membangun kemitraan yang kuat.

Pemerintah dalam mengatur rakyat atau masyarakat sering dihadapkan pada masalah bahkan mungkin banyak masalah baik politik, ekonomi, pembangunan, lingkungan, dan lainnya; demikian juga masyarakat mengatur individu dalam lingkungan kehidupannya. Namun kesulitan atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah atau bersama-sama secara tertib dan damai, saling pengertian. Ungkapan Sunda menyebutkan “*bengkung ngariung bongkok ngaronyok*”. Dalam hal ini bahwa menghadapi kesulitan atau masalah harus diselesaikan secara bersama dan harmonis.

Penutup

Kajian tentang nilai-nilai demokrasi dalam perspektif teoritik telah banyak diungkapkan oleh para ahli yang dipaparkan dalam berbagai referensi. Sedangkan nilai-nilai demokrasi dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang tercermin dalam kearifan budaya lokal Sunda relatif masih

terbatas pengkajiannya. Oleh karena itu dipandang amat esensial menjadi bahan untuk pengembangan bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dan sekaligus menjadi kajian perbandingan di antara keduanya, meskipun barangkali bukan sesuatu yang untuk diperbandingkan. Nilai-nilai demokrasi penting untuk dipahami, disadari, dan diterapkan oleh peserta didik dalam budaya berdemokrasi di masyarakat; dalam hal ini dapat dicontohkan dengan mengangkat nilai-nilai yang berakar pada kearifan budaya lokal Sunda.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ketchum, Richard M. 2004. *Demokrasi, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Niagara.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Luddin, Muchlis R. 2005. *No Choices but Education, Pendidikan Sebagai Pendorong Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Mural.
- Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah*. Bandung: Angkasa.
- Mahasin, Aswab. 2000. *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Rahyono, F. X. 2009. *Kearifan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Rosidi, Ajip. 2011. *Kearifan Lokal*. Bandung: Kiblat
- Rosidi, Ajip. 2004. *Masa Depan Budaya Daerah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ruhaliyah (editor). 2015. *Pendidikan Karakter dalam Budaya Sunda dan Jepang: Sebuah Kajian Perbandingan*. Bandung: UPI bekerja sama dengan Nanzan University.
- Rusyana, Yus. 2011. Menjadi Pribadi Mulia melalui Pendidikan Bahasa. *Makalah*. Bandung: Program Studi Linguistik & Program Studi Bahasa Indonesia-SPS-UPI.
- Sudaryat, Yayat. 2015. *Wawasan Kesundaan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa daerah, FPBS, UPI.
- Suryani NS, Elis. 2011. *Ragam Pesona Budaya Sunda*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zamroni. 2003. *Pendidikan Untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

RIWAYAT PENULIS

Dr. Iyep Candra Hermawan, M.Pd. adalah dosen dipekerjakan (dpk) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur. Pendidikan yang diraih adalah lulusan Sekolah Pascasarjana (S-3) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.